

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN
SAWO KABUPATEN NIAS UTARA**

SKRIPSI

OLEH

RIDWAN TELAUMBANUA

208510004



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/11/24

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN
SAWO KABUPATEN NIAS UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Medan Area



OLEH:

RIDWAN TELAUMBANUA

208510004

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/11/24

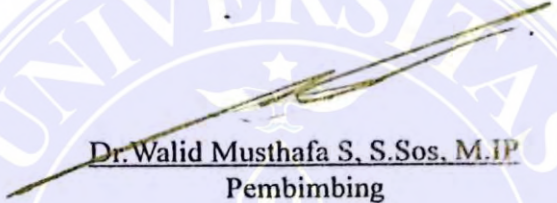
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/11/24

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting Di Desa
Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara
Nama : Ridwan Telaumbanua
Npm : 208510004
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing,



Dr. Walid Musthafa S. S.Sos. M.IP
Pembimbing

Mengetahui :




Dr. Walid Musthafa S. S.Sos. M.IP
Dekan Fakultas ISIPOL




Dr. Novita Wulandari, S.ST., M.SI
Ka Prodi Ilmu Pemerintahan

Tanggal Lulus: 24 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dicantumkan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiarisme dalam skripsi ini.

Medan, 24 September 2024



METERAI
TEMPEL
D7A35ALX406973365

Ridwan Telaumbanua
NPM: 208510004

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR /SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridwan Telaumbanua
Npm : 208510004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi kepentingan memajukan ilmu pemerintahan, setuju untuk mberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara.

beserta dengan perangkat yang ada (jika diperlukan), Universitas Medan Area mempunyai hak bebas royalti non-eksklusif untuk menyimpan, mengirimkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), memelihara, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan sebagai hak cipta. Oleh karena itu, saya membuat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 24 September 2024
Yang menyatakan

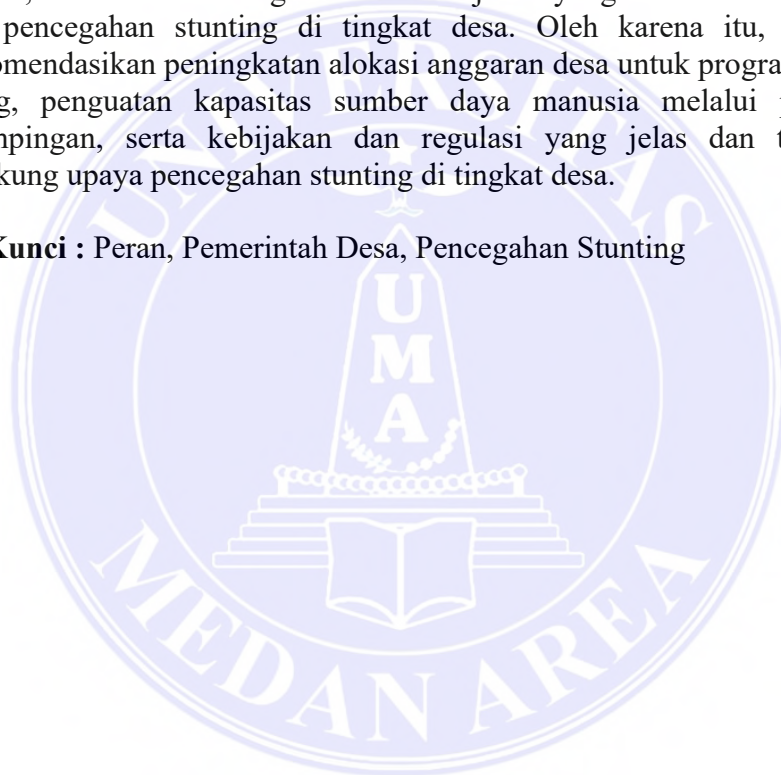


Ridwan Telaumbanua
NPM: 208510004

ABSTRAK

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, yang secara signifikan berdampak buruk pada perkembangan fisik dan kognitif, serta menurunkan produktivitas anak di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam upaya pencegahan stunting di Desa Ombolata Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ombolata Sawo memiliki peran penting dalam pencegahan stunting, namun peran tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang belum memadai, serta ketiadaan regulasi atau kebijakan yang secara khusus mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran desa untuk program pencegahan stunting, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, serta kebijakan dan regulasi yang jelas dan terarah dalam mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa.

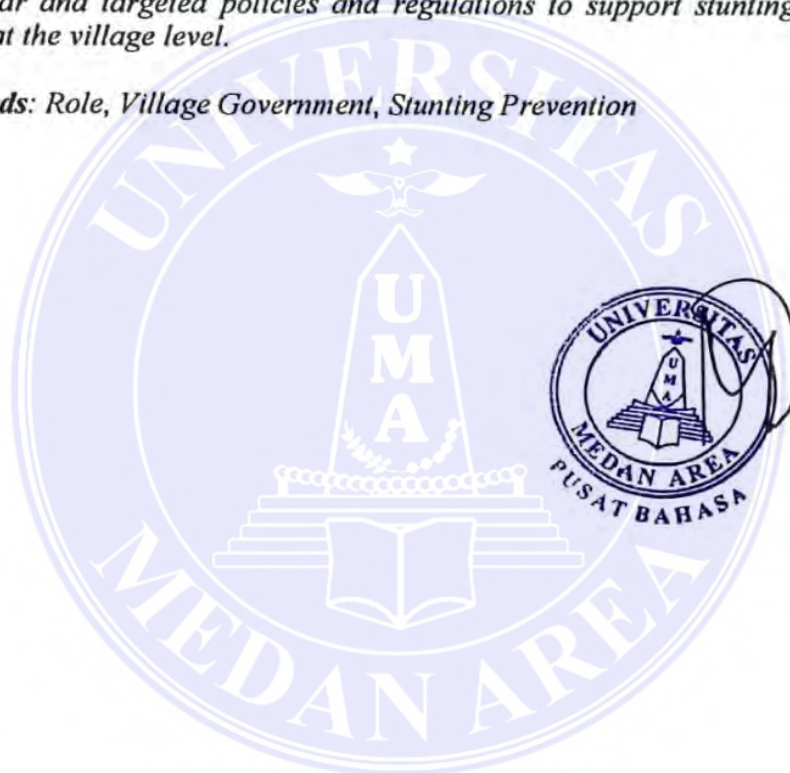
Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pencegahan Stunting



ABSTRACT

Stunting is a condition of impaired growth in children caused by chronic malnutrition, which significantly affects their physical and cognitive development and reduces future productivity. This research aimed to examine the role of the government in preventing stunting in Ombolata Sawo Village, Sawo Sub-district, North Nias Regency. The research used a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The results of this research indicated that the Ombolata Sawo Village Government played an important role in preventing stunting, but the role had not been carried out optimally. Major obstacles identified included limited human resources, inadequate budget allocation, and the absence of specific regulations or policies supporting stunting prevention efforts at the village level. Therefore, this research recommended increasing village budget allocation for stunting prevention programs, strengthening human resource capacity through training and mentoring, and clear and targeted policies and regulations to support stunting prevention efforts at the village level.

Keywords: *Role, Village Government, Stunting Prevention*



RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini, Ridwan Telaumbanua, lahir di Desa Ombolata Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, pada hari Jumat, 27 Juli 2001. Penulis merupakan putra ketiga dari empat bersaudara, anak dari pasangan Meniaro Telaumbanua dan Noverina Zega. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tahun 2019 di SMA Swasta Pembda 1 Gunungsitoli. Selanjutnya, pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Medan Area sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama menjalani masa studi penulis menunjukkan partisipasi aktif baik di bidang akademik maupun organisasi. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti Program Kampus Mengajar Angkatan 5 pada tahun 2023 merupakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Selain itu Penulis terlibat secara aktif dalam Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (IKAMITA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dan juga dalam kegiatan organisasi eksternal yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Nias (FORKAMNIS).

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara”**. Selama Dalam proses penulisan ini, penulis menyadari banyak kekurangan dalam skripsi ini, antara lain kekurangan, kesenjangan pengetahuan, dan kurangnya keahlian.

Penulis juga tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.SC selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring S,Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area sekaligus sebagai dosen pembimbing beserta Jajaran.
3. Ibu Dr. Novita wulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan juga sebagai Dosen Pembimbing saya selama proses penyusunan proposal ini sampai dengan sidang skripsi nantinya.
4. Mulkan Andika Situmorang, S.Pd. M.Pd selaku Dosen Sekretaris yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi.

5. Seluruh pihak bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah memberi ilmu, didikan serta memberi arahan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh bapak dan ibu staf kepegawaian administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah membantu pengurusan berkas yang penulis butuhkan.
7. Ucapan terimakasih Kepada Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
8. Kepada teman-teman satu angkatan Ilmu Pemerintahan 2020, yang selalu bersama-sama dengan saya dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada kekasih yang bernama Stephany Gea yang selalu mendukung dalam segala hal.
10. Terimakasih kepada teman sejawat saya Silvester Telaumbanua & Rynaldi Muhamta telah menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan.

Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun sehingga adanya upaya perbaikan demi kesempurnaan usulan penelitian ini berikutnya. Penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis,

Ridwan Telaumbanua

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Peran	6
2.2 Pemerintah Desa.....	9
2.2.1 Hak/Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat Desa	13
2.3 Stunting	14
2.3.1 Pengertian Stunting	14
2.3.2 Faktor Penyebab Stunting	16
2.3.3 Dampak Stunting.....	19
2.4 Pencegahan Stunting	23
2.4.1 Dasar Hukum Pencegahan Stunting di Indonesia	24
2.4.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting	27
2.5 Penelitian Terdahulu	30
2.6 Kerangka Berpikir	32
III. METEDOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Informan Penelitian	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.4 Teknik Analisis Data	39
3.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian	40
3.5.1 Lokasi	40
3.5.2 Jadwal Penelitian.....	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil	41
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.2 Keadaan Sosial Desa Ombolata Sawo	44
4.1.3 Kondisi Kesehatan.....	45
4.1.4 Pemerintah Desa Ombolata Sawo	50
4.1.5 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Ombolata Sawo.....	51

4.2 Pembahasan.....	55
4.2.1 Peran Pemerintah Desa Ombolata Sawo Dalam Pencegahan Stunting.....	55
4.2.2 Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting di Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara.....	73
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	88



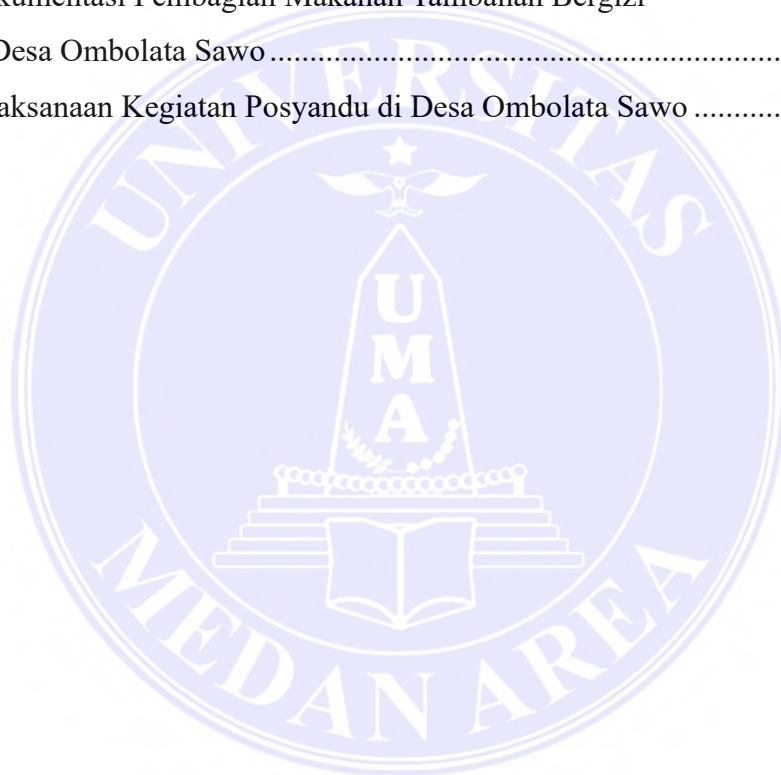
DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
1.	Peneltian Terdahulu.....	31
2.	Informan Penelitian.....	36
3.	Jadwal Rincian Penelitian	40
4.	Letak Geografis Desa Ombolata Sawo Berbatasan Dengan Wilayah Lain.....	44
5.	Fasilitas Kesehatan Desa Ombolata Sawo	48
6.	Tenaga Kesehatan di Desa Ombolata Sawo.....	48



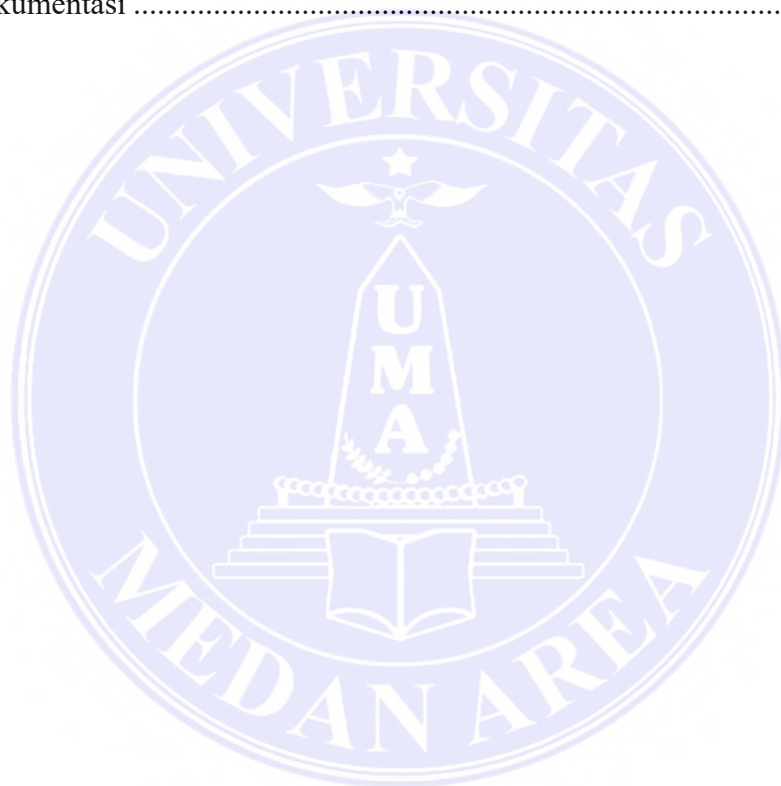
DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
1.	Kerangka Berpikir	34
2.	Peta Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara	41
3.	Peta Desa Ombolata Sawo	42
4.	Kantor Puskesmas Desa Ombolata Sawo	47
5.	Angka Stunting di Desa Ombolata Sawo Tahun 2021 s/d 2024	89
6.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ombolata Sawo	51
7.	Dokumentasi Pembagian Makanan Tambahan Bergizi di Desa Ombolata Sawo	68
8.	Pelaksanaan Kegiatan Posyandu di Desa Ombolata Sawo	69



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Pedoman Observasi	88
2.	Pedoman Wawancara	89
3.	Surat Riset	90
4.	Surat Keterangan Selesai Riset	91
5.	Hasil Observasi	92
6.	Hasil Wawancara	94
7.	Dokumentasi	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kategori jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia terus menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang kompleks seiring dengan meningkatnya populasi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 275,77 juta jiwa, meningkat 1,13% dari tahun sebelumnya. Peningkatan populasi ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya angka kelahiran bayi yang setiap tahunnya terus bertambah. Pada tahun 2022, BPS memproyeksikan jumlah kelahiran mencapai 4,45 juta jiwa, naik 0,22% dari tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah kematian juga mengalami peningkatan, diproyeksikan sebesar 1,73 juta jiwa pada tahun 2022, naik 2,76% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kesehatan masyarakat Indonesia masih menjadi perhatian pemerintah, Kesehatan adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia, baik dari aspek jasmani maupun rohani. Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan tidak hanya diukur dari kondisi fisik dan mental seseorang tetapi juga dari kesejahteraan sosialnya yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Menurut Pasal 28H UUD 1945, setiap orang mempunyai berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan dirinya berkembang seutuhnya sebagai manusia bermartabat. Landasan hukum tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa kesehatan

merupakan hak asasi manusia dan salah satu komponen kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Di Sumatera Utara sendiri tingkat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari BPS menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Sumatera Utara terus meningkat sejak tahun 2018, dari 68,61 menjadi 68,5 pada tahun 2019, dan naik lagi menjadi 69,10 pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun, meskipun ada kemajuan, masih ada banyak daerah yang memerlukan perhatian khusus, salah satunya adalah Kabupaten Nias Utara.

Kabupaten Nias Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan perbaikan oleh pemerintah setempat, diawali dengan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah. Pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan masih rendah. Kondisi kesehatan masyarakat tidak konsisten dan sangat buruk, terutama di desa-desa tertinggal.

Desa Ombolata Sawo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, dengan luas wilayah 13,25 km² dan jumlah penduduk 1.430 jiwa. Desa ini menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan dan kesejahteraan masyarakatnya. Infrastruktur yang buruk, seperti kondisi jalan yang rusak, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia, minimnya lapangan pekerjaan, serta potensi ekonomi lokal yang tidak berkembang, semua berkontribusi pada kondisi kesehatan yang buruk, terutama di kalangan balita.

Stunting, atau kegagalan tumbuh kembang, merupakan salah satu masalah kesehatan paling serius di Desa ini. Stunting adalah suatu kelainan dimana tinggi badan anak lebih rendah jika dibandingkan dengan anak lain seusianya, yang disebabkan oleh kelaparan kronis yang dimulai sejak dalam kandungan dan berlangsung hingga usia dua tahun. Stunting mempunyai dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi stunting, antara lain Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Peningkatan Gizi yang masuk dalam RPJMN 2015-2019, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014. tentang Upaya Peningkatan Gizi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang alokasi Dana Desa untuk mendukung pelaksanaannya. Peraturan ini menjadi pedoman bagi inisiatif nasional pencegahan stunting. Untuk mencapai dampak yang diharapkan, pemerintah desa harus secara aktif melaksanakan kebijakan lokal.

Pemerintah desa mempunyai peran penting dalam mengurangi stunting di masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa mempunyai kendali terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, termasuk kegiatan kesehatan. Pemerintah desa dapat menggunakan anggaran desa untuk mendanai inisiatif pencegahan stunting seperti peningkatan gizi ibu hamil, pemberian makanan tambahan untuk balita, dan melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan gizi kepada masyarakat.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,

serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal menjadi beberapa permasalahan utama. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang memadai tentang pentingnya kesehatan dan bahaya stunting, serta bagaimana cara mencegahnya. Pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program yang mendukung perbaikan gizi ibu hamil, pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita, serta kegiatan edukasi dan konseling gizi bagi masyarakat.

Oleh karena itu berkaitan dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara**, yang bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Desa serta mengidentifikasi variabel yang menghambat keterlibatannya dalam pencegahan stunting stunting.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian diatas, ada beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Ombolata Sawo dalam pencegahan masalah stunting.
2. Apa faktor penghambat pemerintah desa ombolata sawo dalam pelaksanaan program pencegahan stunting di Desa Ombolata Sawo.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini, Adapun tujuan penelitian dapat dikarakterisasi sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa ombolata Sawo dalam melakukan pencegahan stunting sehingga proyeksi akan mengalami penurunan tingkat stunting.
2. Untuk Mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala pemerintah Desa Ombolata Sawo dalam aspek pencegahan stunting, sehingga menemukan solusi dari kendala tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan supaya dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis dari temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian memberikan tambahan wawasan bagi penelitian selanjutnya mengenai Peran Pemerintah Desa dalam pencegahan stunting.
2. Manfaat Praktis Hal ini bertujuan untuk menyampaikan lebih banyak informasi dan masukan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat mengenai pentingnya penurunan stunting pada anak Ombolata Sawo. Penelitian ini juga diartikan sebagai patokan awal bagi peneliti, dan bisa merangsang peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Interaksi sosial merupakan fakta kehidupan baik individu maupun kelompok selalu terikat satu sama lain, maka fungsi setiap orang mempunyai dampak yang signifikan terhadap komunitas di mana mereka tinggal. Peran adalah kumpulan perilaku yang relatif seragam yang secara normatif dibatasi dan diantisipasi dari seorang individu yang menduduki posisi sosial yang dicapai atau diberikan dalam kerangka interaksi sosial.

Arti kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada pemain. Peran dapat digambarkan sebagai aspek pekerjaan atau status yang dapat diubah. Seseorang memenuhi suatu peran apabila ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Teori Peran merupakan teori yang menggabungkan beberapa teori, orientasi, dan bidang keilmuan. Istilah “peran” berasal dari profesi teater, dimana seorang aktor diharapkan memerankan karakter tertentu dan menjalankan peran tersebut dengan cara tertentu.

Selain daripada itu, peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen (1992: 25), memiliki beberapa bagian yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) merupakan metode yang melaluinya seseorang benar-benar memainkan suatu peran.
2. Peranan yang diberikan (*Prescribed Role*) merupakan seperti apa masyarakat mengharapkan kita melakukan pekerjaan yang dimaksud.

3. Konflik peranan (*Role Conflick*) merupakan kondisi individu yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu dengan lain.

Dalam buku Sosiologi atau Pendahuluan (2012: 212), Soejono Soekanto menjelaskan makna peran merupakan komponen dinamis dari kedudukan (status). Seseorang memenuhi suatu peran ketika ia bertindak sesuai dengan hak dan tanggung jawab jabatannya. Komunitas ilmiah mendapat manfaat dari perbedaan antara posisi dan peran. sebab yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya, keduanya tidak dapat dipisahkan.

Peran didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang seharusnya diperoleh oleh orang-orang di dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut sebagai "*role*", yang berarti "tugas atau kewajiban seseorang untuk dilakukan". Kata tersebut menunjukkan "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran digambarkan sebagai serangkaian perilaku yang harus ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat. Sedangkan bagian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu dalam suatu peristiwa.

Menurut Biddle dan Thomas (2015:224), peran adalah serangkaian formulasi yang membatasi tindakan yang diperlukan dari pemegang jabatan. Yang lain menetapkan norma-norma sikap yang pantas yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam pekerjaan tertentu. Harapan terhadap tindakan ini mungkin bersifat spesifik pada kelompok tertentu atau lebih luas. Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217) menyampaikan beberapa indikator Untuk melihat sejauh mana peran yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu tentang perilaku dalam kaitannya tentang peran,

- a. *Expectation* (harapan). Ekspektasi mengenai peran merupakan ekspektasi orang lain mengenai perilaku yang pantas dari seseorang dalam kapasitas tertentu.
- b. *Norm* (norma). norma adalah salah satu bentuk harapan. menurut Secord & Backman, Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Secord & Backman Harapan normatif (*prescribed role expectation*) digolongkan dengan dua jenis harapan: yang pertama adalah harapan terselubung (*covert*) yaitu harapan yang ada tanpa perlu diungkapkan. Kedua, harapan terbuka (*overt*) merupakan harapan yang diungkapkan.
- c. *Performance* (wujud perilaku). Perilaku dalam peran ini otentik dan beragam, beda dari satu pemain dengan pemain lainnya. Teori peran memandang varians ini sebagai sesuatu yang normal dan tidak terbatas. Teori peran biasanya tidak mengkategorikan terminologinya berdasarkan tindakan tertentu.
- d. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi). Evaluasi peran menawarkan opini baik atau buruk mengenai suatu peran berdasarkan apa yang diharapkan darinya. Sedangkan sanksi merupakan upaya masyarakat untuk mempertahankan nilai positif atau mengubah persepsi terhadap suatu kedudukan sehingga yang tadinya dianggap buruk menjadi menguntungkan. Biddle dan Thomas menyampaikan, penilaian dan hukuman bisa saja berasal dari orang lain atau dari dalam diri sendiri (Sarwono, 2015: 217-220).

Maka dari itu sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini peran merupakan fungsi seseorang menjadi pusat tingkah lakunya ketika ia mempunyai

status atau kedudukan untuk menjalankan suatu peran sesuai dengan harapan orang lain.

2.2 Pemerintah Desa

Secara umum Pemerintah berlandaskan dari kata perintah yang artinya menyuruh melakukan suatu tindakan. Menurut Syafiee (2003:22), pemerintah merupakan organisasi yang memegang kekuasaan dan memilih bagaimana umat manusia harus diatur. Sedangkan Ndaraha (2003:6) menyatakan bahwa pemerintah merupakan suatu badan yang bertugas mengolah pelayanan sipil bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan pemerintahan, serta memiliki wewenang untuk mengolah pelayanan publik. Hal ini memastikan bahwa semua anggota masyarakat menerima layanan pada waktu yang tepat, sesuai dengan keinginan yang diperintah.

Sedarmayanti (2004:35) mengartikan pemerintahan sebagai suatu kesatuan atau badan yang antara lain menyelenggarakan pemerintahan negara bagian, negara bagian, atau kota. Sedangkan pemerintahan atau governance mengacu pada tugas administrasi pemerintahan. Pemerintahan menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2009:197) adalah otoritatif pengarah dan pengurusan urusan Masyarakat dalam suatu negara, kota, dan sebagainya, serta otoritatif pengarah dan pengurusan kegiatan masyarakat.

Dalam pengertian pemerintahan daerah, pemerintah dianggap mewakili masyarakat dan bukan mewakili negara, karena daerah merupakan badan hukum yang mempunyai batas-batas tertentu. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang yang luas untuk melaksanakan Kebijakan Otonomi Daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan akan menjadi titik fokus bagi seluruh pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah. Peran pemerintah

daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan, mengendalikan, dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan.

Istilah Desa berawal dari kata Sansekerta deca yang berarti tanah air, wisma, atau tempat lahir. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan desa sebagai suatu kesatuan geografis yang dihuni oleh sekelompok tempat tinggal yang mempunyai bentuk pemerintahan tersendiri (dipimpin oleh seorang Kepala Desa). Hak Ulayat Masyarakat Desa meliputi tanah pertanian, daerah penangkapan ikan, sawah, tanah pangan, semak belukar, dan wilayah laut/danau/sungai/irigasi/tepi gunung.

Dalam bukunya "OTONOMI DESA", H.A.W. Widjaja mengartikan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang khas. Prinsip utama Pemerintahan Desa adalah Pemberdayaan masyarakat, demokratisasi, keberagaman, keterlibatan, dan otonomi yang nyata merupakan cita-cita dasar tata kelola desa.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dan desa adat atau yang sering dikenal dengan berbagai nama lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas geografis dan mempunyai kemampuan menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut berdasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak adat yang diakui dan dihormati oleh penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditegaskan bahwa desa adalah daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten. Oleh karena itu, setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingannya sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.

Pemerintah Desa adalah lembaga milik pemerintah yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, dan proses pemberdayaan desa dan masyarakat desa, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus senantiasa dijadikan sebagai landasan negara.

Pemimpin pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1 ayat 2) membawahi pemerintahan daerah, pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan

Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati. Widjaja (2003:3). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Pasal 2 ayat (1) menyatakan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa, dan Pasal 2 ayat (2) menegaskan Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Perangkat Daerah, dan Pelaksana Teknis.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dikelola oleh pegawai sekretariat. Sekretariat Desa mempunyai tanggung jawab paling banyak pada tiga (3) urusan yaitu urusan administrasi dan umum, keuangan, serta urusan perencanaan. dan paling sedikit 2 (dua) hal yaitu urusan umum dan perencanaan, serta urusan keuangan. Setiap urusan diawasi oleh seorang Kepala Urusan (Kaur).

Pelaksana kewilayahan berperan sebagai elemen pendukung Kepala Desa dalam bentuk satuan tugas kewilayahan Desa. Jumlah elemen pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara kebutuhan pelaksana kewilayahan dan kemampuan keuangan desa, serta mempertimbangkan luas wilayah kerja, karakteristik, geografi, jumlah kepadatan penduduk, sarana serta prasarana yang ada. Pelaksana kewilayahan ini dilakukan oleh Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya.

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang membidangi kegiatan operasional. Teknis Pelaksananya dibagi menjadi tiga (tiga) komponen yaitu pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan, yang masing-masing paling sedikit terdiri dari dua (dua) porsi. Setiap bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (Kasi).

2.2.1 Hak/Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat Desa

1. Dalam UU No 6 tahun 2014 desa berhak.
 - a. Menyelenggarakan dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan hak desa, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial budaya.
 - b. Membentuk dan mengelola lembaga desa.
 - c. Identifikasi sumber pendapatan.
2. Desa mempunyai kewajiban
 - a. menjaga dan memelihara persatuan masyarakat sejalan dengan kerukunan nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.
 - c. Mempromosikan perilaku demokratis.
 - d. Mempromosikan pemberdayaan masyarakat lokal.
 - e. Menyediakan dan meningkatkan layanan bagi masyarakat pedesaan.
3. Dalam UU pasal 68 ayat (1) 2014 tentang desa Masyarakat desa berhak:
 - a. Mendapatkan informasi dari pemerintah desa, serta mengumpulkan dan mengawasi operasional pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil, Menyampaikan aspirasi, saran baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.3 Stunting

2.3.1 Pengertian Stunting

Secara umum, stunting adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan gizi buruk kronis pada anak, yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usia. kondisi ini berkembang pada anak-anak yang diakibatkan kekurangan gizi yang berkepanjangan, terutama pada seribu hari pertama kehidupan, sejak pembuahan hingga usia dua tahun. Stunting digambarkan sebagai tinggi badan anak yang kurang dari rata-rata pertumbuhan anak sehat seusianya.

Stunting didefinisikan oleh WHO (2015) sebagai penurunan tumbuan dan kembang anak akibat seringnya sakit dan kekurangan gizi kronis. Stunting terjadi ketika panjang atau tinggi badan anak kurang dari biasanya. Lebih lanjut WHO (2020) mendefinisikan stunting sebagai suatu kondisi yang bersifat irreversible yang disebabkan oleh kurangnya asupan makanan atau infeksi gangguan kronis yang berulang dalam 1000 HPK. Pendek atau sangat pendek didefinisikan sebagai memiliki rasio tinggi badan dari umur kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO.

Selain kesulitan pertumbuhan fisik, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa stunting mempunyai pengaruh terhadap perkembangan kognitif dan kesehatan secara keseluruhan. Anak-anak yang mengalami stunting mempunyai sistem kekebalan tubuh yang lemah, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi menular seperti diare dan pneumonia, yang dapat memperburuk kesehatan mereka dan menciptakan lingkaran setan kelaparan dan penyakit.

Stunting bukan hanya suatu kondisi yang terjadi dalam waktu singkat, namun juga merupakan kelainan pertumbuhan linier yang berlangsung terus

menerus (WHO 2012). Stunting selama ini banyak digunakan sebagai indikator status gizi masyarakat. Menurut Cobayashi dkk (2013), suatu daerah dapat dianggap menghadapi tantangan pembangunan secara umum jika terdapat tingginya frekuensi balita stunting. Permasalahan tersebut dapat berupa ketersediaan air bersih, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan permasalahan lainnya.

Stunting adalah bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan gizi yang berlangsung lama sejak masa kehamilan hingga usia 24 bulan. Keadaan ini semakin parah karena tidak adanya pertumbuhan yang memadai untuk mengejar ketertinggalan (*catch up growth*). Menurut Wamani dkk., Sandra Fikawati dkk. (2017) menyatakan bahwa stunting disebabkan oleh berbagai alasan antara lain berat badan lahir rendah, stimulasi dan perawatan anak yang buruk, asupan makanan yang tidak mencukupi, seringnya sakit, dan berbagai variabel lingkungan lainnya.

Menurut Gibson (2005), stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, kualitas makanan yang buruk, penyakit, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang terjadi terus-menerus, bahkan di dalam kandungan. Pada awal kehidupannya, janin memerlukan nutrisi untuk mendorong tumbuh kembang yang optimal (Hockenberry dan Wilson, 2011), yang meliputi perkembangan otak dan kognitif (Rosales dan Zeisel, 2008), pertumbuhan tulang dan otot (Specker, 2004), serta hormon sintesis untuk metabolisme glukosa, lemak, dan protein (Gibson, 2005).

Malnutrisi pada masa kehamilan meningkatkan risiko gangguan tumbuh kembang, melemahnya sistem kekebalan tubuh, gangguan struktur dan fungsi otak (Almatsier, 2011), rendahnya produktivitas orang dewasa, dan peningkatan risiko

penyakit kronis yang dapat bertahan hingga usia dewasa. Osmon & Barker (2000). Stunting mempunyai pengaruh jangka panjang terhadap kapasitas otak, terutama jika hal ini dimulai sejak masa bayi, sehingga mengakibatkan buruknya kinerja di masa depan.

2.3.2 Faktor Penyebab Stunting

Menurut Aryu Candra (2020) beberapa faktor penyebab dari stunting sebagai berikut.

1. Faktor genetik

Berdasarkan penelitian yang menyebutkan bahwa tinggi badan orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya stunting pada anak. Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi badan orang lanjut usia, termasuk faktor internal seperti faktor keturunan dan pengaruh eksternal seperti penyakit dan asupan makanan, yang dimulai sejak usia dini. Pengaruh luar bisa berubah, tapi faktor genetik tidak bisa. Hal ini berarti akan sulit untuk menangani stunting yang terjadi pada anak atau keturunan ayah jika sang ayah bertubuh pendek karena karakteristik pendek yang dibawa pada kromosomnya dan gen-gen tersebut diturunkan kepada keturunannya.

2. Status Ekonomi

kondisi ekonomi yang kurang dapat diartikan bahwa daya beli juga rendah sehingga kemampuan untuk membeli bahan makanan yang baik rendah. Kualitas dan kuantitas makanan yang kurang menyebabkan kebutuhan zat gizi anak tidak terpenuhi, padahal anak memerlukan zat gizi yang lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Diketahui bahwa orang tua

dengan daya beli rendah jarang menyediakan telur, daging, ikan, atau kacang-kacangan setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan protein anak belum terpenuhi karena konsumsi proteinnya tidak mencukupi.

3. Jarak Kelahiran

Jarak kelahiran yang sempit (<2 tahun) merupakan faktor risiko terjadinya stunting pada anak usia 1-2 tahun. Anak yang jarak atau jarak usianya <2 tahun dengan saudara kandungnya mempunyai kemungkinan 10,5 kali lebih besar untuk mengalami stunting dibandingkan dengan anak yang mempunyai jarak atau jarak ≥ 2 tahun atau anak tunggal. Jarak kelahiran mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anaknya. Jarak kelahiran yang dekat menyebabkan orang tua semakin repot sehingga berdampak pada kurang optimalnya pengasuhan terhadap anaknya. Hal ini disebabkan karena anak yang lebih besar masih membutuhkan banyak pengasuhan dan masih belum mandiri. Khususnya di rumah-rumah berpenghasilan rendah tanpa pengasuh atau pembantu. Meski sang ibu masih harus mengurus pekerjaan rumah lainnya, hanya dialah yang bisa mengurus anak-anaknya sepenuhnya. Oleh karena itu, konsumsi makanan anak-anak kurang diperhatikan.

4. Riwayat BBLR (berat badan lahir rendah)

Anak yang lahir dengan berat badan rendah (<2500 gram) kemungkinan memiliki panjang badan normal saat lahir. Stunting akan terlihat jelas setelah berbulan-bulan, dan orang tua sering kali mengabaikannya. Orang

tua biasanya mengetahui bahwa anak mereka terhambat ketika ia mulai bergaul dengan teman-temannya dan terlihat lebih pendek dari mereka. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah atau berat badan lahir di bawah normal harus diwaspadai risiko terjadinya stunting. Semakin dini malnutrisi diatasi, semakin kecil kemungkinan seorang anak mengalami stunting.

5. Anemia pada ibu

Anemia pada ibu hamil sebagian besar disebabkan oleh defisit nutrisi, khususnya zat besi. Kekurangan zat besi pada ibu hamil mempengaruhi tumbuh kembang janin sehingga menyebabkan bayi baru lahir berisiko mengalami malnutrisi. Jika malnutrisi pada neonatus tidak segera diatasi, penyakit ini dapat bertambah parah dan berujung pada malnutrisi kronis yang menyebabkan stunting. Wanita hamil dengan anemia lebih mungkin memiliki anak dengan berat badan lahir rendah karena anemia mengurangi aliran oksigen ke metabolisme ibu, yang dapat menyebabkan kelahiran prematur.

6. Hygiene dan sanitasi lingkungan

Faktor kebersihan dan kesehatan lingkungan turut mempengaruhi terjadinya stunting. Menurut penelitian, mikotoksin dalam makanan, kurangnya sanitasi dasar, lantai yang tidak bersih, kualitas bahan bakar memasak yang rendah, dan pembuangan limbah yang tidak tepat semuanya terkait dengan peningkatan risiko stunting pada anak-anak.

7. Defisiensi Zat Gizi

Nutrisi sangat penting untuk pertumbuhan. Pertumbuhan mengacu pada pertumbuhan ukuran dan massa komponen tubuh. Pertumbuhan merupakan

hasil metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses dimana organisme hidup menyerap dan mengubah komponen padat dan cair eksternal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, perkembangan, fungsi organ normal, dan pembangkitan energi. Konsumsi zat gizi yang merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stunting dibagi menjadi dua kategori, yaitu asupan zat gizi makro dan asupan zat gizi mikro. Berdasarkan temuan penelitian, konsumsi protein merupakan makronutrien yang paling berpengaruh, dengan asupan kalsium, dan zat besi menjadi mikronutrien yang paling penting.

2.3.3 Dampak stunting

Arti kata dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif, dampak merujuk pada hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan atau kejadian tertentu. Menurut WHO stunting sangat berdampak negatif terhadap pertumbuhan anak serta berdampak buruk pada masa depan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Stunting mempunyai beberapa dampak negatif terhadap kesehatan anak serta kesehatan masyarakat secara luas, menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018).

1. Dampak Fisik

- a. pertumbuhan terhambat.

Anak-anak yang mengalami masalah stunting sering kali memiliki tubuh lebih pendek dibandingkan anak-anak lain dalam kelompok usianya.

Malnutrisi kronis dalam jangka waktu lama ditunjukkan pada kondisi ini.

- b. Sistem Kekebalan Tubuh Melemah.

Anak-anak yang mengalami masalah stunting memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi termasuk malaria, pneumonia, dan diare.

2. Pengaruh terhadap Fungsi Kognitif dan Perkembangan Mental

a. Berkurangnya Kemampuan Kognitif.

Anak-anak yang mengalami stunting biasanya mengalami penurunan kemampuan kognitif. Mereka lebih rentan mengalami tantangan belajar dan berprestasi lebih buruk secara akademis.

b. Perkembangan Motorik yang Tertunda.

Kapasitas anak untuk melakukan tugas fisik dan kemampuan motorik halusnya dipengaruhi oleh stunting dan perkembangan motorik yang lamban.

3. Dampak Sosial

a. Anak-anak yang mengalami stunting seringkali mempunyai masalah psikososial, termasuk rendahnya harga diri dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Pertumbuhan sosial dan emosional mereka mungkin terhambat oleh hal ini, yang dapat menyebabkan isolasi sosial, kurangnya partisipasi dalam kegiatan kelompok, dan kesulitan membentuk hubungan yang sehat. Mereka mungkin merasa dikucilkan atau didiskriminasi oleh teman sebaya, yang lebih lanjut memperburuk rasa rendah diri dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri secara sosial. Akibatnya, perkembangan kepribadian dan keterampilan sosial mereka dapat terhambat, mempengaruhi kualitas hidup dan peluang masa depan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

c. Keberhasilan akademik anak juga dipengaruhi oleh keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif yang disebabkan oleh stunting. besar kemungkinan Mereka merasa kesulitan dalam memberikan perhatian di kelas, sehingga memengaruhi kinerja akademik dan tujuan pembelajaran.

i. Dampak Jangka Panjang

a. Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM).

Penyakit tidak menular pada orang dewasa, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, lebih mungkin menyerang anak-anak yang mengalami stunting. Malnutrisi kronis pada masa kanak-kanak dapat mengubah fungsi organ secara permanen, sehingga membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit tidak menular (PTM). Kekurangan gizi yang berkelanjutan dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan organ-organ vital seperti pankreas, jantung, dan pembuluh darah. Misalnya, penurunan jumlah sel beta di pankreas akibat malnutrisi dapat mengurangi produksi insulin, meningkatkan risiko diabetes di kemudian hari. Selain daripada itu, malnutrisi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur pembuluh darah, meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Secara keseluruhan, dampak jangka panjang dari stunting bukan hanya sebatas pada pertumbuhan fisik yang terhambat, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis yang dapat mengurangi kualitas hidup dan harapan hidup seseorang.

b. Produktivitas Ekonomi Berkurang.

Stunting mempunyai dampak finansial yang besar. Anak-anak yang mengalami stunting seringkali akan menjadi orang dewasa yang kurang

produktif dalam bekerja, sehingga membatasi kapasitas mereka untuk memberikan kontribusi ekonomi. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan, karena rendahnya produktivitas individu secara kolektif mengurangi output ekonomi dan pendapatan nasional. Selain itu, biaya kesehatan yang meningkat akibat komplikasi kesehatan terkait stunting juga membebani sistem kesehatan dan anggaran pemerintah. Dengan kata lain, stunting bukan hanya mempengaruhi seseorang yang mengalaminya akan tetapi juga dapat menghambat pembangunan ekonomi dan memperburuk kemiskinan di tingkat nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (2018) memverifikasi bahwa stunting mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam terhadap kesehatan fisik, kognitif, sosial, dan ekonomi anak. Stunting mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta dampak jangka panjang yang mungkin mengganggu kualitas hidup dan produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, pencegahan dan penurunan stunting memerlukan strategi yang matang dan terkoordinasi. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan keadaan sosial ekonomi dan pendidikan, serta nutrisi dan akses terhadap layanan kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak buruk dari stunting dan memungkinkan generasi mendatang untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif.

2.4 Pencegahan Stunting

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan berawal dari kata prevent yang berarti menghentikan terjadinya sesuatu. Pencegahan mencakup

mengambil tindakan sebelum suatu kejadian terjadi. Mencegah suatu kejadian umumnya ditandai dengan intervensi sebelum hal itu terjadi. Tindakan pencegahan harus didasarkan pada data atau pengetahuan yang diperoleh dari studi epidemiologi. Individu melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan untuk terjadi.

Pencegahan berasal dari kata Latin *praevenire* yang berarti “mendahului, mengantisipasi, atau mencegah terjadinya sesuatu”. Dalam pengertian yang lebih luas, pencegahan digambarkan sebagai upaya yang disengaja untuk menghindari gangguan atau kerugian pada orang atau masyarakat (Notosoedirdjo dan Latipun, 2005: 145).

Dalam konsep kesehatan, pencegahan dalam arti luas tidak hanya mengacu pada mereka yang sehat, tetapi juga mereka yang sakit, dengan tujuan mencegah kematian, kesakitan, kecacatan, ketidakpuasan, dan penderitaan. Sementara itu, National Public Health Partnership (2006) mendefinisikan pencegahan sebagai aktivitas komunal yang meningkatkan, melindungi, dan memelihara kesehatan pada komunitas tertentu.

Stunting masalah kesehatan yang umum terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah miskin. Tentu saja hal ini berpotensi mempengaruhi keluaran masa depan setiap orang di masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan stunting harus menjadi tujuan utama kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penyediaan nutrisi yang baik sejak usia dini, akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan sanitasi dan kebersihan lingkungan.

2.4.1 Dasar Hukum Pencegahan Stunting di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, termasuk langkah-langkah untuk menghindari stunting. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memenuhi hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat, artinya pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

PEPRES No 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional menerangkan Peran pemerintah dalam mencegah stunting sangatlah penting, karena pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya untuk melakukan intervensi yang besar dan berkelanjutan. Beberapa peran utama pemerintah dalam mencegah stunting antara lain:

1. Kebijakan dan Perencanaan

Pemerintah dapat membuat kebijakan dan perencanaan yang mendukung pencegahan stunting, seperti program-program gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta program pendidikan gizi untuk masyarakat.

2. Pendidikan dan Penyuluhan

Pemerintah dapat melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, dan pemberian makanan pendamping ASI yang layak (MP-ASI).

3. Pelayanan Kesehatan

Pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan termasuk pelayanan antenatal dan postnatal, serta pelayanan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak.

4. Pemberian makanan tambahan

Pemerintah dapat memberikan suplementasi atau makanan tambahan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak balita, serta anak-anak yang mengalami gizi buruk.

5. Pantauan dan Evaluasi

Pemerintah harus sering melakukan pemantauan dan penilaian terhadap upaya pencegahan stunting yang telah dilaksanakan untuk mengetahui efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

PEPRES No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi menekankan perlunya upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menghindari dan mengatasi permasalahan stunting. Kegiatan-kegiatan ini harus direncanakan dan dikoordinasikan secara hati-hati, dengan fokus utama pada seribu hari pertama kehidupan sejak konsepsi hingga usia dua tahun, merupakan masa penting bagi tumbuh kembang seorang anak. Jika anak tidak mendapat asupan nutrisi yang tepat dan seimbang pada masa ini, maka ia berisiko tinggi mengalami stunting. Oleh karena itu, percepatan perolehan gizi pada masa ini menjadi fokus utama dalam upaya memerangi stunting.

Strategi pencegahan stunting yang diatur dalam PEPRES No 42 Tahun 2013 mencakup beberapa aspek. Pertama, edukasi gizi kepada ibu hamil dan keluarga merupakan langkah penting untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya gizi yang seimbang dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Edukasi ini juga mencakup pola asuh yang baik, seperti pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dan pemberian makanan pendamping ASI yang tepat setelahnya. Kedua, pemberian makanan tambahan yang kaya zat gizi kepada anak dan ibu hamil merupakan langkah lanjutan dalam memastikan bahwa kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan baik.

Selain edukasi dan pemberian makanan tambahan, PEPRES No 42 Tahun 2013 juga menekankan pentingnya peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan yang baik dapat membantu dalam mendeteksi dini dan menangani masalah gizi pada anak, sehingga dapat mencegah terjadinya stunting. Pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa program-program pencegahan dan penanganan stunting berjalan dengan efektif dan efisien.

Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan stunting didasarkan pada PEPRES No 42 Tahun 2013 harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan angka stunting di Indonesia dapat terus menurun dan kesehatan serta kualitas hidup anak-anak Indonesia dapat terjamin.

2.4.2 Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting

Berdasarkan PEPRES No 42 tahun 2013 Pencegahan dan penanganan stunting merupakan gerakan yang berskala nasional dan oleh karena itu pemerintah desa juga memiliki kewenangan yang signifikan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa pemerintah desa

memegang peran penting dalam pembangunan di bidang kesehatan, termasuk dalam upaya pencegahan stunting.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah desa memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengelola serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Ini mencakup penyuluhan gizi kepada masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan balita, serta upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan. Pemerintah desa diharapkan dapat secara aktif berkontribusi dalam mengatasi masalah stunting melalui berbagai program dan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat desa.

Salah satu upaya pencegahan stunting di pedesaan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya pola makan seimbang untuk tumbuh kembang anak. Hal ini dapat dicapai melalui konseling dan sosialisasi yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan setempat, serta acara komunitas yang melibatkan ibu hamil dan menyusui. Pemahaman yang kuat mengenai gizi seimbang akan mendorong individu untuk lebih peduli terhadap gizi anak sehingga dapat memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Melalui edukasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang partisipatif, diharapkan masyarakat desa dapat lebih memahami dan menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penurunan angka stunting di wilayah tersebut.

Dalam mendukung Upaya Pencegahan stunting yang berskala nasional yang disampaikan dalam PEPRES No 42 Tahun 2013 mengenai Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah desa juga memiliki peran yang penting yang

sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut.

1. Memberikan edukasi kepada ibu hamil dan anak tentang pentingnya gizi yang seimbang untuk pertumbuhan optimal anak. Hal ini dapat dilakukan melalui sesi penyuluhan di Posyandu, kelompok ibu, dan kampanye penyuluhan gizi.
2. Mendorong pola makan sehat dengan memperhatikan ketersediaan dan akses terhadap makanan bergizi, terutama yang kaya akan zat besi, protein, dan vitamin.
3. Pantau Pertumbuhan Balita Melalui Posyandu, anak-anak dapat dipantau pertumbuhannya secara berkala. Dengan memantau pertumbuhan, stunting dapat dideteksi lebih dini dan tindakan yang tepat dapat segera dilakukan.
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, khususnya bagi ibu hamil dan anak.
5. Pemberdayaan Masyarakat Melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pencegahan stunting, sehingga program tersebut dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan budaya lokal.

Beberapa undang-undang telah disahkan untuk membantu pemerintah desa dalam mengurangi stunting setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu undang-undang yang paling penting adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT). Peraturan Nomor 11 Tahun 2019 menetapkan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020. Peraturan ini menjadi pedoman penggunaan uang desa oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan pembangunan, termasuk kesehatan.

Dalam peraturan ini, dinyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk mendukung program-program kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting. Dengan adanya peraturan tersebut, desa-desa diharapkan dapat mengalokasikan dana desa secara efektif untuk mendukung upaya pencegahan stunting melalui program peningkatan gizi, penyediaan layanan kesehatan ibu dan anak, serta kegiatan lain yang mendukung kesehatan masyarakat. Dengan menggunakan dana Desa, pemerintah Desa mempunyai peluang untuk melaksanakan program kegiatan sebagai berikut.

1. Penyediaan Layanan Kesehatan Dasar

Penggunaan dana desa untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar.

2. Penyuluhan dan Edukasi Gizi.

Dana desa dapat dialokasikan untuk kegiatan penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang, yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan posyandu, kelas ibu hamil, dan kelompok belajar masyarakat.

3. Program Promotif dan Preventif.

Implementasi program-program promotif dan preventif dengan berfokus pada kesehatan ibu dan anak, seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan rutin, dan pemantauan tumbuh kembang anak.

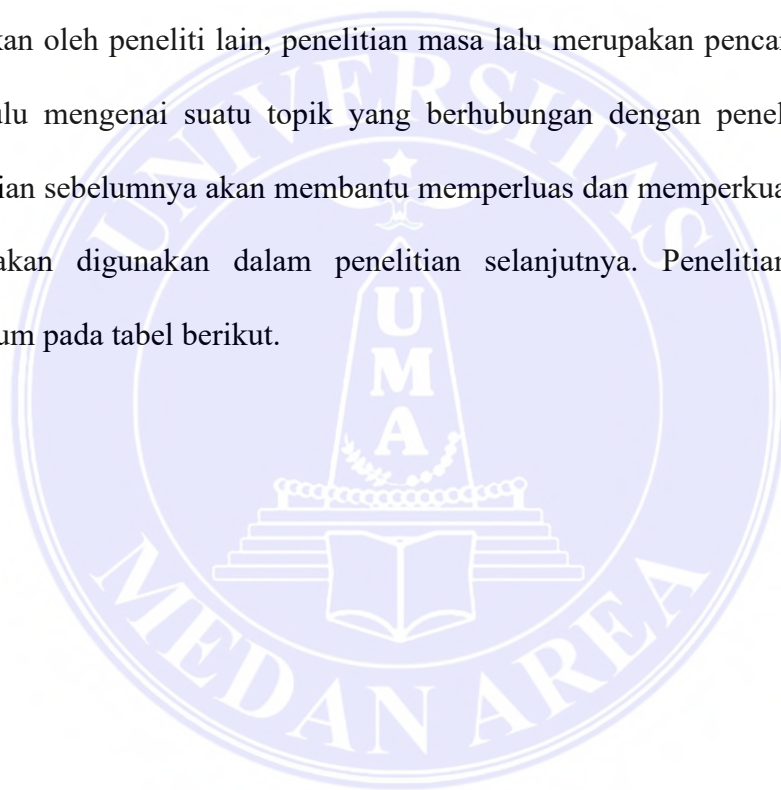
4. Pengadaan Sarana serta Prasarana Kesehatan.

Pembelian dan pengadaan alat kesehatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di desa untuk mendukung kegiatan kesehatan dan pencegahan stunting.

Dengan undang-undang ini, pemerintah desa kini memiliki landasan hukum yang jelas dalam menggunakan dana desa untuk mencegah stunting, memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi prevalensi stunting di kalangan Masyarakat Desa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian penulis terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, penelitian masa lalu merupakan pencarian penelitian terdahulu mengenai suatu topik yang berhubungan dengan penelitian saat ini. Penelitian sebelumnya akan membantu memperluas dan memperkuat banyak teori yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian sebelumnya tercantum pada tabel berikut.



Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dan persamaan	Sumber
1	PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRAS. (Fina Aura Regita, Ananta Prathama)	Kualitatif	Untuk menanggulangi stunting, penting melibatkan pemangku kepentingan di tingkat daerah, khususnya pemerintahan desa. Di Desa Wedoro, fokus utama penanganan stunting adalah intervensi gizi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan, dan intervensi gizi sensitif, seperti peningkatan akses air bersih dan sanitasi	perbedaan penelitian yang sebelumnya ditemukan di lokasi penelitian Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur adalah tempatnya. Sedangkan Desa Ombolata Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara menjadi lokasi penelitian saat ini. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah fokusnya pada bagaimana pemerintah dapat mencegah stunting.	Jurnal
2	EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PADASARI KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG. AYU PATMAWATI (2020)	Kualitatif	Dalam pelaksanaan program terdapat kesulitan atau hambatan, seperti perbedaan cara masyarakat menyikapi permasalahan stunting. Orang tua sasaran masih menghadapi kesulitan akibat ketidakpatuhan mereka terhadap anjuran pelaksana program untuk menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah stunting. Tantangan utamanya adalah target sering kali mengabaikan informasi yang diberikan. kemudian sarana dan prasarana juga yang kurang memadai dalam penyelenggaraan program.	Meskipun penelitian sebelumnya mengenai pencegahan stunting di pedesaan memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian saat ini, namun terdapat juga beberapa perbedaan. Misalnya, penelitian sebelumnya melihat efektivitas program pencegahan stunting, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam pencegahan stunting.	Skripsi

3	UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN STUNTING PADA ANAK DI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Ayu Nadia Pramazuly 2022)	Kualitatif	Pemerintah Kabupaten Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, berupaya menghindari stunting pada anak antara lain dengan mengadakan penyuluhan formasi di Kampung KB, memperketat aturan program pencegahan stunting, dan meningkatkan peran penyuluh KB.	Dalam penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam penelitian ini yang berfokus pada pencegahan stunting akan tetapi dalam penelitian terdahulu menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian saat ini yaitu menggunakan teori peran.	Jurnal
4	PERAN PEMERINTAH-AN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DESA DI DESA BERTAH KECAMATAN TIGA PANAH KABUPATEN KARO (Dartianis Haria, Kalpin Sembiring, Juander Sebayang, Besti Rohana Simbolon)	Kualitatif	- Posyandu disediakan di kecamatan untuk mengatasi gizi buruk pada anak sekaligus menekankan keprihatinan masyarakat dan melakukan kompromi dalam penanganan stunting di Desa Bertah. - Penyebab permasalahan stunting di Desa Bertah adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perlunya pola hidup sehat yang meliputi kesehatan lingkungan, serta tersedianya data statistik daerah tertinggal yang kurang dapat diandalkan, sehingga banyak sekali program yang ada di Desa Bertah. Rencana intervensi gizi yang sensitif untuk mencegah stunting tidak tepat sasaran.	Dalam penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini mulai dari teori, metode penelitian dan instansi yang diteliti, tetapi lokasi penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang membedakan.	jurnal

2.6 Kerangka berpikir

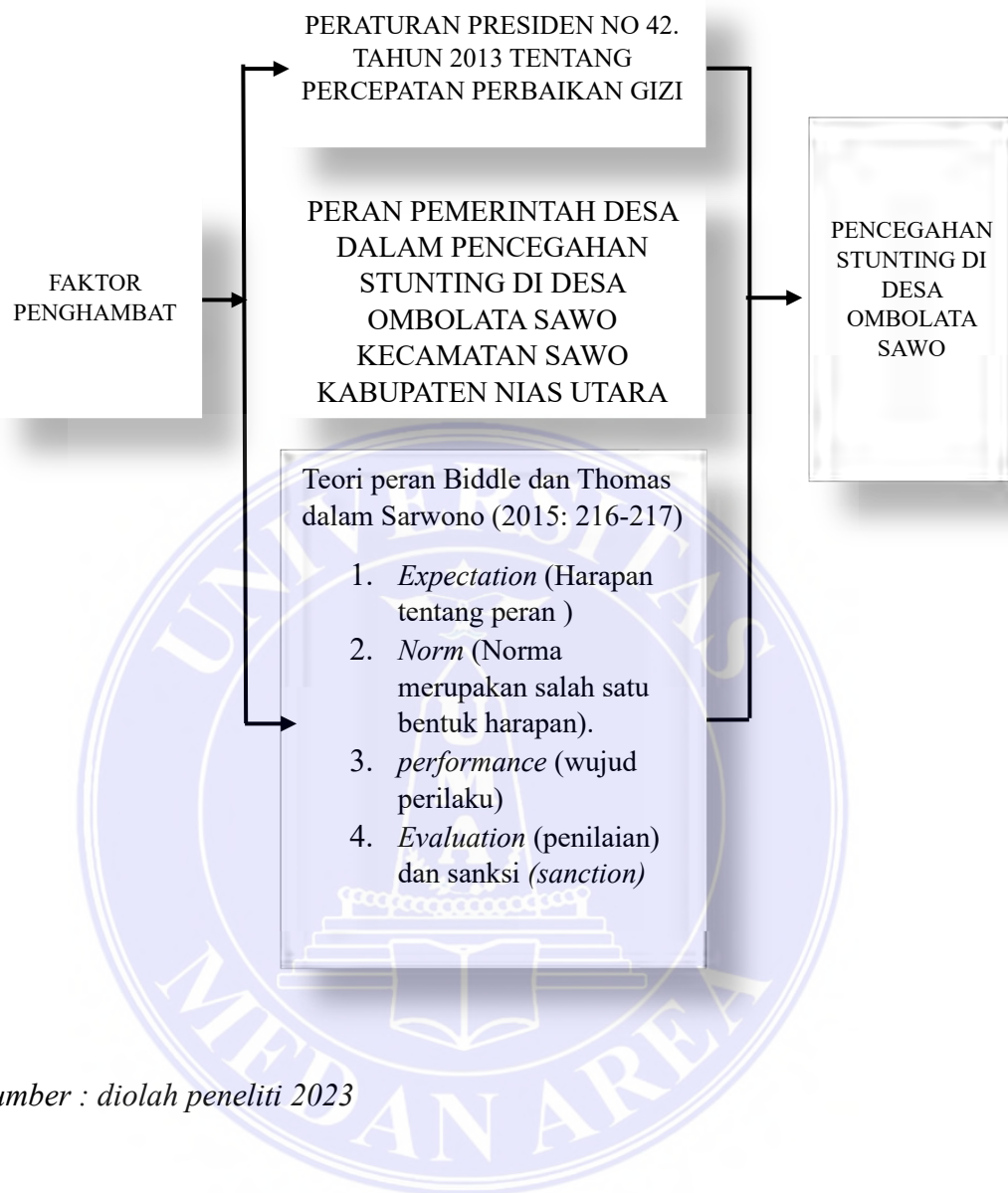
Untuk menjamin kesesuaian temuan penelitian dengan observasi lapangan, penulis mendefinisikan kerangka berpikir sebagai suatu gagasan dalam penelitian yang menggambarkan bagaimana penelitian dilakukan dari awal sampai akhir.

Penulis menciptakan kerangka berpikir, secara tegas mengikatnya pada sejumlah teori yang saling berhubungan. Kerangka berpikir tersebut dipandang relevan guna menjawab tantangan rumusan masalah penulis.

Kerangka ini memuat beberapa tabel, diawali dari judul penelitian yaitu Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara, kemudian peneliti menggunakan teori Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216- 217), yang mencakup empat (4) indikator, Ekspektasi Ekspektasi terhadap peran Norma Norma merupakan salah satu jenis ekspektasi. Ekspektasi Peran yang Ditetapkan adalah kewajiban yang timbul seiring dengan peran, dan Penilaian Peran.

Setelah menggunakan teori tersebut yang dianggap relevan peneliti memperoleh hasil bahwa peran pemerintah Desa dalam pencegahan stunting di desa ombolata sawo masih belum maksimal. Dalam implimentasi peran tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah. Oleh karena itu, peneliti harus menyelidiki permasalahan spesifik yang menghambat pemerintah Desa Ombolata Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara dalam pencegahan stunting.

Gambar 1. kerangka berpikir



Sumber : diolah peneliti 2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mencoba menawarkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (1982), penelitian kualitatif adalah suatu cara pengumpulan data deskriptif dari individu dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati, dengan penekanan pada konteks dan kemanusiaan secara keseluruhan.

Menurut Wilimas dalam Moleong (2007:5), penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data dalam konteks alami dengan menggunakan metodologi dan dilakukan oleh individu atau peneliti dengan tujuan ilmiah. Sementara itu, Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi berbeda dalam ilmu-ilmu sosial yang terutama berkaitan dengan pengamatan individu dalam lingkungan alaminya dan menghubungkan mereka melalui bahasa dan terminologi.

Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan utuh mengenai keadaan empiris di lapangan tentang keterlibatan Pemerintah Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara dalam pencegahan stunting. Sehingga informasi yang dikumpulkan lengkap, faktual, dan benar. Strategi pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.2 Informan Penelitian

Sugiyono (2018) mendefinisikan sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau sumber yang relevan dengan tantangan peneliti

dan dapat menyampaikan informasi tergantung pada skenario dan situasi penelitian. Informan adalah seseorang yang dapat memberikan gambaran menyeluruh dan rinci mengenai permasalahan yang diteliti.

Bagong Suyatno (2005:172) mengelompokkan informan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. Informan kunci merupakan seseorang yang memiliki keahlian dan informasi penting lainnya yang diperlukan untuk penelitian.
2. Informan utama yaitu mereka yang mempunyai hubungan langsung terhadap kegiatan sosial yang dimaksud.
3. Informan tambahan artinya seseorang yang bisa menyumbangkan data namun tidak berpartisipasi aktif dalam komunikasi atau interaksi sosial yang diteliti.

Tabel 2. Informan penelitian

No	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Kepala Desa Desa Ombolata Sawo (Lasoaro Telaumbanua)	1	Informan Kunci
2	Kader Pembangunan Manusia (Repi Silastri Harefa)	1	Informan Utama
3	Kepala seksi Pelayanan dan Kesejahteraan (KASI) (Soni'aro Telaumbanua)	1	Informan Utama
4	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Elinius Telaumbanua S.pd)	1	Informan Utama
5	Masyarakat A. Samahati Telaumbanua B. Meniaro Telaumbanua S.pd C. Atiria Nazara D. Noverina Zega	4	Informan tambahan
	JUMLAH		8

Sumber: diolah oleh peneliti 2023

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019), pengumpulan data penelitian kualitatif terjadi pada setting alami dengan menggunakan sumber data primer dan memerlukan observasi yang lebih langsung atau terselubung, wawancara mendalam, dan pencatatan. Hal ini dikarenakan informasi yang digunakan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung akan suatu benda di lingkungannya, baik secara terus-menerus maupun bertahap, dan meliputi berbagai kegiatan perhatian yang ditujukan untuk mempelajari suatu benda. Widoyoko (2014:46) mengartikan observasi sebagai mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai komponen gejala suatu subjek. Jadi dalam penelitian ini observasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya dan representatif, karena penulis melakukan observasi langsung di lokasi penelitian dan menarik kesimpulan tentang seluruh kegiatan sosial yang terjadi di sana.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah di mana pertanyaan dan jawaban dipertukarkan dengan informan terpilih untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang diselidiki. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019:418), wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk berbagi informasi dan pemikiran melalui pertanyaan dan tanggapan. Wawancara dilakukan untuk mempelajari dan mencoba mengumpulkan data yang akurat dan sumber data yang dapat diterima.

Strategi wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti terlebih dahulu membuat panduan wawancara untuk digunakan sebagai acuan selama wawancara berlangsung. Menurut Sugiyono (2019), wawancara terstruktur digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data sudah mengetahui informasi yang ingin diperoleh. Jadi, sebelum melakukan wawancara, pengumpul data menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis untuk diajukan kepada informan.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap informan terpilih untuk mengumpulkan informasi mengenai topik penelitian. Informan diharuskan untuk memberikan tanggapan menyeluruh dan rinci terhadap pertanyaan pewawancara. Informan juga mempunyai pilihan untuk tidak menjawab pertanyaan jika mereka yakin pertanyaan tersebut memuat informasi yang tidak boleh diungkapkan.

Berikut langkah-langkah dalam melakukan wawancara dalam penelitian ini:

1. Menetapkan kepada siapa proses wawancara akan dilakukan.
2. Menetapkan pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan.
3. Menulis hasil wawancara.
4. Mengidentifikasi hasil wawancara

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film atau gambar, dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi digunakan bersamaan dengan observasi

dan wawancara (Sugiyono,2019). Berdasarkan pernyataan di atas, dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan melalui penggunaan gambar.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Basrowi dan Suwandi dalam bukunya *Understanding Qualitative Research* (2011: pp. 209-210), anjuran Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (1992), pendekatan analisis data mengandung tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses memilih, memusatkan, mengabstraksi, dan memanipulasi data mentah dari suatu lapangan. Teknik ini terjadi dari awal hingga akhir penyelidikan. Hasil reduksi data disajikan dalam bentuk ringkasan. Dalam pendekatan ini, penulis mengumpulkan data secara bertahap, diawali dengan observasi lapangan, wawancara, dan dokumen lain yang dikelompokkan berdasarkan subjek penelitian, kemudian dilakukan penyempurnaan data dengan mencari data baru.

2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain uraian singkat, infografis, korelasi kategori, diagram alur, dan lain sebagainya. Cara paling populer untuk menyampaikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui penulisan naratif.

3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi secara keseluruhan. Verifikasi kesimpulan juga dilakukan selama penelitian.

3.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.5.1 Lokasi

lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh informasi tentang data yang dibutuhkan untuk temuan penelitian. Penelitian bertempat di kantor Desa Ombolata Sawo di Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara.

3.5.2 Jadwal Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejak oktober 2023 s/d juli 2024.

Tabel 3. Jadwal rincian penyelesaian skripsi.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		Okt 23	Des 23	Feb 24	Mei 24	Juni 24	juli 24	Sept 24
1.	Pengajuan judul	■						
2.	Observasi awal							
3.	Penyusunan proposal							
4.	Bimbingan dan Perbaikan Proposal							
5.	Seminar Proposal		■					
6.	Revisi Proposal			■				
7.	Observasi Lapangan dan Wawancara				■			
8.	Penyusunan Bab IV – V					■		
9.	Seminar Hasil						■	
10.	Bimbingan Dan Perbaikan							■
11.	Sidang Skripsi							■
12.	Penyerahan Skripsi							■

Sumber: diolah oleh peneliti 2023.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting di Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Ombolata Sawo memiliki peran penting dalam pencegahan stunting, namun hingga saat ini peran tersebut belum optimal. Keterlibatan pemerintah desa masih terbatas dan belum menunjukkan langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan program-program yang dapat membantu mencegah stunting. dalam hal itu Masyarakat Desa Ombolata Sawo memiliki harapan besar agar pemerintah desa lebih aktif dan proaktif dalam menangani masalah stunting melalui berbagai program dan kebijakan yang tepat sasaran. Mereka menginginkan adanya inisiatif nyata dari pemerintah desa, seperti penyuluhan kesehatan, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak, serta pengawasan dan pemantauan terhadap pertumbuhan anak-anak di desa. Namun, kenyataannya, pemerintah desa belum berkontribusi secara aktif dalam mengatasi masalah stunting ini.
2. Beberapa faktor penghambat peran pemerintah Desa Ombolata Sawo dalam pencegahan stunting adalah:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

kurangnya pengetahuan dan kemampuan pemerintah desa Ombolata Sawo dalam menalakan program-program yang diperlukan dalam pencegahan stunting dan juga Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan terlatih, minimnya fasilitas, Serta kurangnya kesadaran dan komitmen pemerintah desa Ombolata Sawo dalam memprioritaskan program pencegahan stunting.

b. Keterbatasan Anggaran

Anggaran desa yang tersedia tidak mencukupi untuk mengimplementasikan program-program pencegahan stunting secara optimal.

c. Ketiadaan Regulasi dan Kebijakan Khusus

Belum ada regulasi dan kebijakan khusus dari pemerintah desa yang fokus pada pencegahan stunting.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diambil berdasarkan dari hasil dan pembahasan tentang peran pemerintah desa dalam pencegahan stunting di Desa Ombolata Sawo:

1. Pelatihan dan Pendidikan SDM

Mengadakan pelatihan khusus bagi pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menangani masalah stunting. Ini bisa melibatkan ahli gizi, dokter, dan lembaga pendidikan terkait.

2. Peningkatan Fasilitas Kesehatan

Meningkatkan dan memperbaiki fasilitas kesehatan di desa, termasuk menyediakan peralatan medis yang memadai dan ruang konsultasi untuk ibu hamil dan anak-anak.

3. Pengalokasian Anggaran yang Tepat

Menyusun perencanaan anggaran yang lebih baik untuk memastikan sumber daya yang memadai dialokasikan untuk program pencegahan stunting. Transparansi dalam penggunaan anggaran juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

4. Penyuluhan

Melaksanakan program penyuluhan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pencegahan stunting. Ini bisa dilakukan melalui posyandu, sekolah, dan media lokal.

5. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Membuat dan mengimplementasikan regulasi serta kebijakan khusus di tingkat desa yang fokus pada pencegahan stunting. Kebijakan ini dapat mencakup alokasi dana khusus, program intervensi gizi, dan layanan kesehatan rutin untuk ibu dan anak.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan upaya pencegahan stunting di Desa Ombolata Sawo dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almatsier, S. 2011. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Amir, N. and Purnama, D. (2021) "Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis, Kertha Wicaksana,
- Biddle, Bruce J., and Edwin J. Thomas. 1966. Role Theory: Concepts and Research. New York: Wiley.
- Candra, A. 2020. Epidemiologi Stunting. Cetakan ke 1. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Cohen Bruce J. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rineka Cita 1992. Dominan Kaji Ulang dan Teori Kritis. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Duverger. Maurice. 2010. Sosiologi Politik, terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fertman, C., Allensworth, D.D. (2010). Health Promotion Programs from Theory to Practice San Fransisco: Jossey Bass
- Fransisca, C. 2008. Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Persarafan. Jakarta Salemba Medika
- Gibson, R. S. 2005. Principles of Nutritional Assessment. Second Edition. Oxford University Press Inc, New York.
- Heizer, Jay and Render Barry, (2015), Manajemen Operasi Manajemen Keberlangsungan dan Rantai Pasokan, edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.
- Hockenberry, M., Wilson, D. (2011). Wong's nursing care of infants and children, ninth edition. USA:Elsevier.
- Mulyanto Sumardi, Hans Dieter Evers. (2001). Klasifikasi Jabatan sosial- ekonomi. Univeritas Pendidikan Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1- 2. Jakarta : Rineka Cipta.
- Notoatmodjo S. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta. 2011:146-50.
- Notosoedirdjo dan Latipun. 2005. Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan. Malang : UMM Press.
- Rochajat, dkk. 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. 2015. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sedarmayanti, 2004, Good Government (Pemerintahan yang baik); Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soejono. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Subagyo. 2002. Statistik Induktif. Edisi ke- empat. Cetakan Keempat. BPFE. Yogyakarta.
- Suyitno. 1989. Petunjuk Laboratorium Rekayasa Pangan. Yogyakarta : Pangan dan Gizi UGM.
- Syafiie, Inu Kencana. (2003). Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung:Refika Aditama.

Widoyoko, Eko Putro. (2014). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jurnal Online

Aryastami, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. *Indonesian Bulletin of Health Research*, 45(4), 233-240.

Ayuningtyas et al, (2018). Analisa Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya.

Basrowi, & Juariyah, S. (2010). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/jep.v7i1.577>.

Febriana, SW dan Rohmah, W. (2014) Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI IPS SMA N 1 Purwantoro Tahun ajaran 2013/2014. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*

Fikawati S, Syafiq A, Veratamala A. Gizi Anak dan Remaja. Depok: Rajawali Pers; 2017.

Omondi, D. O., & Kirabira, P. (2016). Socio-Demographic Factors Influencing Nutritional Status of Children (6-59 Months) in Obunga Slums, Kisumu City, Kenya. *Public Health Research*, 6(2), 62-75. <https://doi.org/10.5923/j.phr.20160602.07>.

Rahma dkk. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Analisis*. Vol.4 No.2, Desember 2015. Hal:183-189.

Sukmawati AP, Rahayu UB, Saffanah DN, Putri HA, Filmasari F, Ardiansyah M, et al. Implementation Of Stimulation. Detection And Early Intervention Of Child Growth For Paud Teachers Ngawi DistricT. *Pros Webinar Abdimas #1*. 2021:1(7):101-8.

Suwandi, & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2), 261-270.

Peraturan Perundang-undangan

PEPRES No 42. Pasal 1 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/Pmk.07/2019.

Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD pasal 32 Adapun tugas dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

permendesa No 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa upaya pencegahan stunting.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah desa.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 tentang Pemiliharaan Kesehatan.

Undang-Undang Kesehatan No 23 tahun 1992.

Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa)
pada pasal 68 ayat 2.
Undang-undang pasal 68 ayat (1) 2014 tentang desa Masyarakat desa

Lain-lain

<https://pahamify.com/blog/pahami-materi/materi-ips/internalisasi-nilai-norma-dan-pembentukan-kepribadian/>.

Kementrian Kesehatan RI. 2018. Profil Kesehatan Indonesia 2017. Jakarta: Kemenkes RI Diakses pada tanggal 31 Januari 2019 dari <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-tahun-2017.pdf>

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/119/kesehatan-dan-makna-sehat

https://www.academia.edu/22142768/Definisi_sumber_daya_pembangunan.

WHO. Child Stunting World Health Statistics data visualizations dashboard. World Health Organization 2019.

<https://apps.who.int/gho/data/node.sdg.2-2-viz-1?lang=en> [16 Januari 2020].

WHO. Stunting in nutshell [internet]. World Health Organization. 2015 [cited 2021 Jun 10]. Available from: <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Observasi

**(PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN SAWO
KABUPATEN NIAS UTARA)**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut.

1. Lokasi
2. Fasilitas sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan / program
4. Respon/ Sikap

Instansi :
 Nama Program :
 Lokasi :
 Tanggal :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti/Indikator
1	Layanan pengaduan/ informasi			
2	Struktur organisasi-tupoksi			
3	SOP			
4	Sikap pegawai			
5	Dokumen arsip			
6	Visi dan misi			
7	Website instansi			
8	Sosial media instansi			
9	Agenda kegiatan/program			
10	Laporan kegiatan/program			
11	Kegiatan sosial masyarakat			
12	Sikap/respon masyarakat			
13	Sarana prasarana a. Ruang kerja b. Ruang tunggu c. Parkir d. Toilet e. Papan informasi f. Ruang arsip/perpustakaan kantor g. Perangkat computer h. WIFI			

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

(PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN SAWO KABUPATEN NIAS UTARA)

A. Identitas resaponden.

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

B. Pertanyaan – pertanyaan.

1. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?
.....
.....
.....
2. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?
.....
.....
.....
3. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?
.....
.....
.....
4. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?
.....
.....
.....
.....

Lampiran 3

Surat riset lapangan.

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Kampus I : Jalan Kolek Nomor 1, Medan Estate (061) 7360158, 7360373, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Satelebud Nomor 79 / Jalan Bel Berayu Nomor 70 A, (061) 8225802 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: unlu_medanarea@uma.ac.id	
Nomor	: 150/FIS.1/01.10/I/2024	Medan, 23 Januari 2024
Lampiran	: -	
H a l	: Permohonan Izin Pengambilan Data Riset	
Kepada Yth. Kepala Desa Ombolota Sawo Desa ombolota Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara		
Dengan hormat, Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :		
Nama	: RIDWAN TELAUMBANUA	
NIM	: 208510004	
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan	
Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Desa Ombolota Sawo untuk menyelesaikan penelitian riset yang berjudul :		
<i>Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Ombolota Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara</i>		
Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.		
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.		
		 Ridwan Telaumbanua S., S.Sos, M.P
Tembusan: 1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan 2. Mahasiswa ybs 3. Arsip		

Lampiran 4

Surat keterangan selesai riset



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
KECAMATAN SAWO
DESA OMBOLATA SAWO**

Alamat : jalan idano sawo km.8 e-mail : ombolatasawo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 424/16/05/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara menerangkan bahwa,

Nama : **RIDWAN TELAUMBANUA**
NPM : 208510004
Tempat /Tgl Lahir : Dange/27 juli 2001
Jenis kelamin : Laki – laki
Asal perguruan tinggi : Universitas Medan Area

Telah melaksanakan penelitian / riset di Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara dengan judul **Peran pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara**, dimulai sejak tanggal 01 februari sampai dengan 20 februari 2024

Demikian surat keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ombolata Sawo, februari 2024
PJ. KEPALA DESA OMBOLATA SAWO



LASOARO TELAUMBANUA,ST
NIP. 19741125 200112 1 005

Lampiran 5

Hasil observasi

**(PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN SAWO
KABUPATEN NIAS UTARA)**

Berikut adalah hasil observasi peneliti.

5. Lokasi
6. Fasilitas sarana dan prasarana
7. Pelaksanaan kegiatan / program
8. Respon/ Sikap

Instansi : Kantor Desa Ombolata Sawo
 Nama Program : Pencegahan Stunting
 Lokasi : Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara
 Tanggal : 01 februari 2024 s/d 20 februari 2024

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti/Indikator
1	Layanan pengaduan/ informasi	√		1. Pelayanan informasi langsung ke kantor desa Ombolata Sawo
2	Struktur organisasi-tupoksi	√		Terdaftar di dokumen lampiran penelitian halaman 43
3	SOP	√		File tersedia dalam bentuk laporan
4	Sikap pegawai		√	1. Kurang ramah 2. Sikap berbelit belit (indikator ini dilihat peneliti sejak melakukan penelitian sampai selesai)
5	Dokumen arsip	√		Dokumen berbentuk buku laporan
6	Visi dan misi		√	-
7	Website instansi		√	-
8	Sosial media instansi	√		Fb : Desa Ombolata Sawo
9	Agenda kegiatan/program	√		Agenda kegiatan disampaikan di sub

				informasi publik dan arsip berita Sistem informasi digital pemerintah desa ombolata sawo
10	Laporan kegiatan/program	√		Agenda kegiatan disampaikan di sub informasi publik dan arsip berita Sistem informasi digital pemerintah desa ombolata sawo
11	Kegiatan sosial masyarakat	√		1. Posyandu 2. Gotong royong
12	Sikap/respon masyarakat	√		1. Baik/ramah. 2. Pada program pencegahan stunting ini ada sikap masyarakat yang baik/taat mengikuti prosedur dan arahan dari pemerintah Desa Ombolata Sawo jika kegiatan dilaksanakan. tetapi ada juga yang tidak peduli, dan merasa itu tidak penting indikator ini dilihat dari hasil observasi beberapa informan
13	Sarana prasarana a. Ruang kerja b. Ruang tunggu c. Parkir d. Toilet e. Papan informasi f. Ruang arsip/perpustakaan kantor g. Perangkat komputer h. WIFI	√		Sarana dan prasarana dilihat langsung oleh peneliti dan layak untuk digunakan.

Lampiran 6

Hasil Wawancara

(PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN SAWO KABUPATEN NIAS UTARA)

Informan kunci

A. Identitas resaponden.

1. Nama : Lasoaro Telaumbanua, SE
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Umur : 48 Tahun
4. Pekerjaan : pj. Kepala Desa Ombolata Sawo
5. Pendidikan : Sarjana

B. Hasil wawancara

1. Apa peran pemerintah Desa Ombolata Sawo dalam pencegahan stunting ?

Jawaban : dalam program kegiatan Upaya pencegahan stunting pemerintah Desa Ombolata Sawo sebagai penyedia pelayanan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Ombolata Sawo sebagai peran pelayanan dalam pencegahan stunting ?

Jawaban : kegiatan yang pernah dilakukan di Desa Ombolata Sawo dalam Upaya pencegahan stunting adalah pembagian makanan bergizi tambahan untuk bayi dan balita pada tahun lalu sebelum saya menjabat, akan tetapi untuk saat ini penganggaran selanjutnya masih dalam proses nanti akan disesuaikan dari kemampuan dana desa.

3. Apakah ada sosialisasi mengenai pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ombolata Sawo ?

Jawaban : Selalu kita sampaikan baik secara langsung maupun melalui kader kader posyandu akan tetapi masih ada masyarakat yang merasa itu tidak penting sehingga bersikap sepele.

**(PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN SAWO
KABUPATEN NIAS UTARA)**

Informan Utama

A. Identitas resaponden.

1. Nama : Repi Silastri Harefa
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 35 Tahun
4. Pekerjaan : Kader Pembangunan Manusia (KPM)
5. Pendidikan : SMA

B. Hasil wawancara

1. Bagaimana peran ibu sebagai Kader Pembangunan Manusia dalam Upaya pencegahan stunting di Desa Ombolata Sawo?

Jawaban : dalam program kegiatan Upaya pencegahan stunting saya sebagai KPM berkewajiban untuk membantu melakukan pemantauan layanan pencegahan stunting dengan sasaran rumah tangga yaitu 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta mensoialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada pemerintah dan masyarakat desa dengan bekerja sama kepada pihak yang berperan dalam pencegahan stunting seperti perangkat desa, bidan desa, dan kader kader posyandu.

2. Apakah di Desa Ombolata Sawo terdapat anak yang mengalami stunting ?

Jawaban : di Desa Ombolata Sawo setiap tahun masih terdapat anak yang mengalami stunting.

3. Apakah ada penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ombolata Sawo kepada anak yang stunting tersebut ?

Jawaban : sampai saat ini belum pernah ada penanganan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ombolata Sawo kepada anak yang mengalami stunting

**(PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN SAWO
KABUPATEN NIAS UTARA)**

Informan Utama

A. Identitas resaponden.

1. Nama : Soni'aro Telaumbanua
2. Jenis Kelamin : Laki laki
3. Umur : 50 Tahun
4. Pekerjaan : KASI Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat
5. Pendidikan : SMA

B. Hasil wawancara.

1. Bagaimana peran kasi pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat dalam pencegahan stunting di Desa Ombolata Sawo ?

Jawaban : peran saya sebagai kasi pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai pelaksana suatu kegiatan yang berhubungan dengan stunting yang telah di anggarkan.

2. Apa saja kegiatan pencegahan stunting yang sudah dilaksanakan di Desa Ombolata Sawo ?

Jawaban : kegiatan yang pernah kita lakukan adalah dengan membagikan makanan bergizi tambahan bagi anak bayi dan balita dengan tujuan membantu mencegah stunting terhadap anak anak di lingkungan Desa Ombolata Sawo.

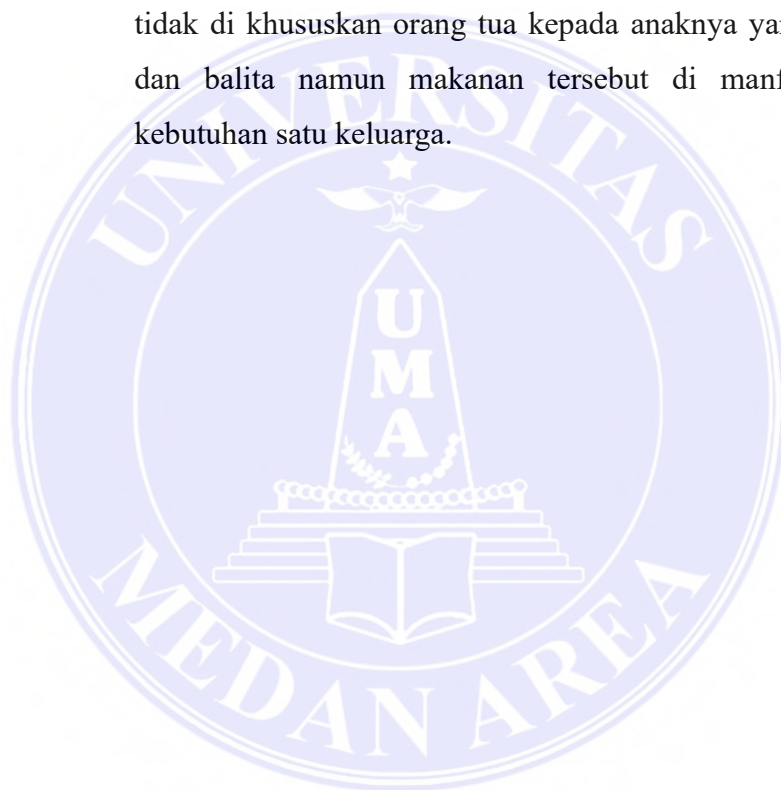
3. Apa saja faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting ?

Jawaban : faktor yang menjadi penghambat pemerintah Desa Ombolata Sawo dalam pencegahan stunting yaitu yang pertama adalah sikap Masyarakat yang tidak peduli dan menganggap sepele stunting bagi anak, kemudian Masyarakat yang tidak mengerti apa itu stunting dan apa yang menjadi efek kedepannya, dan faktor ekonomi Masyarakat juga bisa menjadi menghalang karena kondisi ekonomi orang tua yang buruk sehingga tidak mampu

membeli bahkan jarang memberikan makanan yang bergizi kepada anak

4. Dari beberapa faktor penghambat pemerintah desa Ombolata Sawo dalam pencegahan stunting lalu bagaimana Tindakan pemerintah desa dalam mengatasi hal tersebut ?

Jawaban : untuk membantu ekonomi masyarakat tindakan yang pernah kita lakukan adalah pembagian makanan bergizi tambahan pada tahun 2023 akan tetapi itupun masih belum ada hasil yang memuaskan, disebabkan karna makanan bergizi yang kita berikan tersebut tidak di khususkan orang tua kepada anaknya yang masih bayi dan balita namun makanan tersebut di manfaatkan untuk kebutuhan satu keluarga.



**(PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN SAWO
KABUPATEN NIAS UTARA)**

Informan Utama

A. Identitas resaponden.

1. Nama : Elinius Telaumbanua S.pd
2. Jenis Kelamin : Laki laki
3. Umur : 45 Tahun
4. Pekerjaan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Pendidikan : Sarjana

B. Hasil wawancara

1. Apa peran badan permusyawaratan desa dalam Upaya pencegahan stunting di Desa Ombolata Sawo?

Jawaban : dalam hal pencegahan stunting di Desa Ombolata Sawo Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya, namun BPD hanya menampung semua aspirasi masyarakat desa kemudian di sampaikan ke pemerintahan desa untuk penganggaran pelaksanaan kegiatan tersebut

2. Apakah sudah ada penganggaran pencegahan stunting untuk dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ombolata Sawo ?

Jawaban : pencegahan stunting memang sering kita sampaikan untuk dilaksanakan. Akan tetapi untuk saat ini masih belum ada kegiatan yang sudah dilaksanakan artinya masih dalam tahap perencanaan.

3. Apa yang menjadi faktor penghambat pemerintah Desa Ombolata Sawo dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting ?

Jawaban : kalau faktor penghalang pemerintah dalam pelaksanaannya ya mungkin masalah biaya yang tidak cukup kemudian faktor yang lainnya saya rasa lebih ke masyarakat yang kurang paham mengenai stunting saja.

**(PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN SAWO
KABUPATEN NIAS UTARA)**

Informan Tambahan

A. Identitas resaponden.

1. Nama : Samahati Telaumbanua
2. Jenis Kelamin : Laki laki
3. Umur : 45 Tahun
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : SMA

B. Hasil wawancara

1. Apa yang menjadi harapan masyarakat kepada Pemerintah Desa Ombolata Sawo terhadap masalah stunting ?

Jawaban : saya mengharapkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan di Masyarakat yang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, untuk saat ini keinginan Masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pelayanan kesehatan Masyarakat dengan menganggarkan kegiatan yang menjadi Upaya pencegahan stunting.

2. Bagaimana peran pemerintah Desa Ombolata Sawo dalam Upaya pencegahan stunting ?

Jawaban : selama ini saya melihat proses pencegahan stunting yang dilakukan pemerintah desa Ombolata Sawo belum efektif, selama beberapa tahun terakhir masih cuman satu program upaya pencegahan stunting yang dilaksanakan Program tersebut cuman satu kali dilakukan pada tahun 2023 yaitu pemberian makanan tambahan bagi anak dan balita. Artinya peran pemerintah desa Ombolata Sawo dalam pencegahan stunting masih belum terlihat jelas.

3. Apakah ada sosialisasi tentang bahaya stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ombolata Sawo ?

Jawaban : kalau tentang sosialisasi selama ini masih belum ada.

**(PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN SAWO
KABUPATEN NIAS UTARA)**

Informan Tambahan

A. Identitas resaponden.

1. Nama : Meniaro Telaumbanua S,pd
2. Jenis Kelamin : Laki laki
3. Umur : 53 Tahun
4. Pekerjaan : PNS
5. Pendidikan : Sarjana

B. Hasil wawancara

1. Apa yang menjadi harapan masyarakat kepada Pemerintah Desa Ombolata Sawo terhadap masalah stunting ?

Jawaban : saya mengharapkan adanya pembinaan penambahan pengetahuan masyarakat tentang bahaya stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ombolata Sawo melalui soaialisasi.

2. Apa faktor utama yang menjadi penghambat percepatan pencegahan stunting ?

Jawaban : faktor utamamanya yaitu sikap masyarakat yang sangat sepele terhadap stunting, disebabkan karena masyarakat tidak sepenuhnya memahami bahaya akan stunting tersebut.

3. Bagaimana Tindakan pemerintah Desa Ombolata Sawo terhadap permasalahan masyarakat tersebut ?

Jawaban : selama ini Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa belum.

**(PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN SAWO
KABUPATEN NIAS UTARA)**

Informan Tambahan

A. Identitas resaponden.

1. Nama : Atiria Nazara
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 39 Tahun
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : -

B. Hasil wawancara

1. Apa yang menjadi harapan masyarakat kepada Pemerintah Desa Ombolata Sawo terhadap masalah stunting ?
Jawaban : saya mengharapkan adanya Penganggaran pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting.
2. Menurut pemahaman ibu sejauh mana masyarakat Desa Ombolata Sawo mengenal yang Namanya stunting ?
Jawaban : menurut ibu ya masyarakat desa ombolata sawo ini belum paham betul yang Namanya stunting sehingga apapun yang dilakukan pemerintah mengenai pencegahan stunting masyarakat tidak peduli.
3. Apakah ada sosialisasi tentang bahaya stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ombolata Sawo ?
Jawaban : kalau sosialisasi belum ada dilakukan oleh pemerintah Desa Ombolata Sawo, kecuali dari kader kader posyandu yang diberikan pemahaman kepada orang tua

(PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN SAWO KABUPATEN NIAS UTARA)

Informan Tambahan

A. Identitas resaponden.

1. Nama : Noverina Zega
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 48 Tahun
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : -

Hasil wawancara

1. Apa yang menjadi harapan masyarakat kepada Pemerintah Desa Ombolata Sawo terhadap masalah stunting ?
Jawaban : saya mengharapkan adanya pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting di Desa Ombolata Sawo supaya kedepannya tidak ada lagi anak yang mengalami stunting..
2. Menurut pemahaman ibu sejauh mana masyarakat Desa Ombolata Sawo mengenal yang namanya stunting ?
Jawaban : menurut ibu ya masyarakat desa ombolata sawo Sebagian sudah paham tetapi masih saja tidak peduli. Kemudian ada juga yang belum paham betul yang namanya stunting sehingga apapun yang dilakukan pemerintah mengenai pencegahan stunting masyarakat tidak peduli.
3. Apakah ada sosialisasi tentang bahaya stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ombolata Sawo ?
Jawaban : kalau sosialisasi belum ada dilakukan oleh pemerintah Desa Ombolata Sawo.

Lampiran 7

Dokumentasi Penelitian

Foto pembagian makanan tambahan bergizi di Desa Ombolata Sawo



Foto pelaksanaan Kegiatan Posyandu di Desa Ombolata Sawo



Foto kepada bapak Lasoaro Telaumbanua SE,
(Pj. Kepala Desa Ombolata Sawo)

Foto kepada bapak Elinius Telaumbanua S.pd
Badan permusyawaratan desa (BPD)



Foto kepada Ibu Repi Silastri Harefa
Kader Pembangunan Manusia (KPM)



Foto kepada bapak Soniaro Telaumbanua
Kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat (KASI)



Foto kepada bapak Meniaro Telaumbanua
S.pd
Tokoh masyarakat



Foto kepada bapak Samahati Telaumbanua
Tokoh masyarakat



Foto kepada Ibu Atiria Nazara



Foto kepada Ibu Noverina Zega



